



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIT KERJA : INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
SUB UNIT KERJA : BIRO AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, PERENCANAAN, DAN KERJASAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JAKA SUSILO
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN
3. NHK : 69299

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 691.646.000

1. Tanah Seluas 350 m2 di BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 117.250.000
2. Tanah Seluas 860 m2 di BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 147.520.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 245 m2/60 m2 di BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 91.798.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 198 m2/54 m2 di BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 75.078.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 1.005 m2/200 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 49.900.000

1. MOTOR, YAMAHA V-IXION SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000
2. MOBIL, MITSUBISHI COLT PICK UP Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR ` Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000
4. MOTOR, SUZUKI SHOUGUN Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 26.750.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	30.650.367
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	798.946.367
III. HUTANG	Rp.	199.072.774
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	599.873.593

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **31 Januari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.